



BUPATI KETAPANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI KETAPANG
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG

ANGGARAN KAS PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KETAPANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah serta menjamin ketersediaan dana yang cukup untuk mendanai pengeluaran yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD), maka penyediaan dana SKPD didasarkan pada anggaran kas yang telah dibahas antara SKPD dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendaharawan Umum Daerah (BUD);
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 120 Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, tata cara pelaksanaan penyusunan anggaran kas Pemerintah Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Anggaran Kas Pemerintah Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2020 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 92);
8. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 117);
9. Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2023 Nomor 86);

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANGGARAN KAS PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Anggaran Kas merupakan dokumen yang memuat perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kabupaten Ketapang dalam satu tahun anggaran.

Pasal 2

- (1) Anggaran Kas Pemerintah Kabupaten Ketapang dimaksudkan untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran sesuai dengan rencana penarikan dana yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) yang telah disahkan.
- (2) Anggaran Kas Pemerintah Kabupaten Ketapang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan belanja dalam rangka penyediaan dan pengendalian anggaran.

Pasal 3

Mekanisme pengelolaan Anggaran Kas Pemerintah Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berdasarkan rancangan DPA-SKPD menyusun dan menyampaikan rancangan Anggaran Kas SKPD untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pengeluaran SKPD kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendaharawan Umum Daerah (BUD) bersamaan dengan rancangan DPA-SKPD paling lama 6 (enam) hari kerja setelah diterimanya surat pemberitahuan tentang penyusunan DPA-SKPD dan Anggaran Kas;
- b. atas dasar usulan dari SKPD dan rancangan Anggaran Kas yang telah dibahas, PPKD selaku BUD menyusun Anggaran Kas Pemerintah Kabupaten Ketapang guna mengatur ketersediaan dana yang cukup untuk mendanai pengeluaran/ belanja yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ketapang;
- c. setelah Anggaran Kas Pemerintah Kabupaten Ketapang ditetapkan, Kepala SKPD mengajukan permohonan penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD) untuk masing-masing kegiatan kepada PPKD selaku BUD;
- d. PPKD menerbitkan SPD berdasarkan Anggaran Kas dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA-SKPD);
- e. SPD sebagaimana dimaksud pada huruf d disiapkan oleh kuasa BUD untuk ditandatangani PPKD;
- f. dalam hal penyediaan dana tidak mencukupi kebutuhan per bulan atau per triwulan, Kepala SKPD dapat mengajukan permohonan pelampauan batas tertinggi penyediaan dana kepada PPKD selaku BUD; dan

g. persetujuan...

- g. persetujuan pelampauan batas tertinggi penyediaan dana oleh PPKD selaku BUD, dengan mempertimbangkan ketersediaan dana, rincian kebutuhan dan waktu penggunaan anggaran SKPD.

Pasal 4

Rincian Anggaran Kas Pemerintah Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ketapang.

Ditetapkan di Ketapang
pada tanggal 3 Januari 2024

BUPATI KETAPANG,

ttd

MARTIN RANTAN

Diundangkan di Ketapang
pada tanggal 3 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KETAPANG,

ttd

ALEXANDER WILYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2024 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. KETAPANG



MINTARIA, SH, MH
NIP. 19700703 199903 1 007

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI KETAPANG
 NOMOR 1 TAHUN 2024
 TENTANG
 ANGGARAN KAS PEMERINTAH
 KABUPATEN KETAPANG TAHUN
 ANGGARAN 2024

DAFTAR ANGGARAN KAS PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG
 TAHUN ANGGARAN 2024

Kode Rekening	Uratan	Jumlah Anggaran	Jumlah RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
ALOKASI PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN															
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rp211.579.698.485	Rp211.579.698.485	Rp25.461.823.839,666664	Rp17.069.779.529,666666	Rp17.306.736.779,666664	Rp17.421.736.779,666664	Rp17.481.736.779,666664	Rp17.305.236.779,666664	Rp17.330.494.404,666664	Rp17.967.249.627,666664	Rp17.433.000.779,666664	Rp17.884.582.280,666664	Rp14.563.240.407,666666	Rp14.354.080.496,666674
4.1.01	Pajak Daerah	Rp132.264.123.000	Rp132.264.123.000	Rp10.952.677.486	Rp11.001.870.236	Rp10.952.677.486	Rp10.952.677.486	Rp10.952.677.486	Rp10.952.677.486	Rp10.952.677.486	Rp11.572.190.334	Rp10.952.677.486	Rp11.355.964.979	Rp10.832.677.486	Rp10.832.677.563
4.1.02	Retribusi Daerah	Rp60.917.883.808	Rp60.917.883.808	Rp5.378.454.676,666666	Rp5.386.909.293,666666	Rp5.579.059.293,666666	Rp5.579.059.293,666666	Rp5.574.059.293,666666	Rp5.596.559.293,666666	Rp5.579.816.918,666666	Rp5.589.059.293,666666	Rp5.590.323.293,666666	Rp5.609.617.301,666666	Rp2.753.562.921,666666	Rp2.701.402.933,666674
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp6.947.691.677	Rp6.947.691.677	Rp6.947.691.677	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	Rp11.450.000.000	Rp11.450.000.000	Rp2.183.000.000	Rp681.000.000	Rp775.000.000	Rp890.000.000	Rp955.000.000	Rp756.000.000	Rp798.000.000	Rp806.000.000	Rp890.000.000	Rp919.000.000	Rp977.000.000	Rp820.000.000
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	Rp2.173.424.826.564	Rp2.173.424.826.564	Rp329.778.740.750	Rp159.710.900.405	Rp149.767.606.795	Rp349.581.703.945	Rp108.432.010.198	Rp142.371.471.145	Rp234.837.542.145	Rp108.432.010.197	Rp181.509.502.345	Rp162.554.775.645	Rp138.016.552.797	Rp108.432.010.197
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Rp2.072.147.842.000	Rp2.072.147.842.000	Rp329.778.740.750	Rp151.609.799.000	Rp141.666.505.400	Rp341.480.602.550	Rp97.289.691.500	Rp134.270.369.750	Rp226.736.440.750	Rp97.289.691.500	Rp173.408.400.950	Rp154.453.674.250	Rp126.874.234.100	Rp97.289.691.500
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Rp101.276.984.564	Rp101.276.984.564	Rp0	Rp8.101.101.405	Rp8.101.101.395	Rp8.101.101.395	Rp11.142.318.698	Rp8.101.101.395	Rp8.101.101.395	Rp11.142.318.697	Rp8.101.101.395	Rp8.101.101.395	Rp11.142.318.697	Rp11.142.318.697
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	Rp293.364.166.895	Rp293.364.166.895	Rp293.364.166.895	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Rp238.383.786.000	Rp238.383.786.000	Rp238.383.786.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	Rp54.980.380.895	Rp54.980.380.895	Rp54.980.380.895	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN PER BULAN		Rp2.678.368.691.944	Rp2.678.368.691.944	Rp648.604.731.484,6666	Rp176.780.679.934,6667	Rp167.074.343.574,666666	Rp367.003.440.724,6666	Rp125.913.746.977,666666	Rp159.676.707.924,666666	Rp252.168.036.549,666666	Rp126.399.259.824,666666	Rp198.942.503.124,666666	Rp180.439.357.925,666666	Rp152.579.793.204,6667	Rp122.786.090.693,66667

JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN PER TRIWULAN	Rp2.678.368.691.944	Rp2.678.368.691.944	Rp992.459.754.993,9999	Rp652.593.895.626,9999	Rp577.509.799.499	Rp455.805.241.824,00006
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN PER SEMESTER	Rp2.678.368.691.944	Rp2.678.368.691.944		Rp1.645.053.650.621		Rp1.033.315.041.322,9999

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Jumlah RAK	Semeter I						Semeter II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
ALOKASI BELANJA DAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN															
5.1	BELANJA OPERASI	Rp1.674.845.937.146	Rp1.674.845.937.146	Rp159.041.888.589,25	Rp171.979.360.679,25	Rp271.601.171.025,25	Rp188.055.776.414,25	Rp158.656.265.436,25	Rp138.309.921.804,25	Rp155.227.611.541,25	Rp104.509.639.130,25	Rp122.978.851.876,25	Rp91.007.267.228,25	Rp84.303.639.128,25	Rp29.174.544.293,25
5.1.01	Belanja Pegawai	Rp1.027.110.636.992	Rp1.027.110.636.992	Rp100.157.472.747,25	Rp63.789.331.407,25	Rp161.914.403.561,25	Rp113.672.274.506,25	Rp91.180.594.446,25	Rp86.902.769.907,25	Rp103.240.088.964,25	Rp66.388.638.303,25	Rp92.899.104.996,25	Rp65.221.149.645,25	Rp62.592.755.989,25	Rp19.152.052.518,25
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp503.933.957.986	Rp503.933.957.986	Rp50.129.545.842	Rp74.406.699.272	Rp54.463.681.486	Rp57.379.106.981	Rp50.423.317.227	Rp45.431.619.397	Rp47.753.722.577	Rp37.287.525.827	Rp30.079.746.880	Rp25.786.117.583	Rp20.770.383.139	Rp10.022.491.775
5.1.05	Belanja Hibah	Rp143.582.554.833	Rp143.582.554.833	Rp8.754.870.000	Rp33.783.330.000	Rp55.193.085.978	Rp17.004.394.927	Rp17.048.566.428	Rp5.915.532.500	Rp4.173.800.000	Rp768.475.000	Rp0	Rp0	Rp940.500.000	Rp0
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	Rp218.787.335	Rp218.787.335	Rp0	Rp0	Rp30.000.000	Rp0	Rp3.787.335	Rp6.000.000	Rp6.000.000	Rp6.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.2	BELANJA MODAL	Rp572.178.736.384	Rp572.178.736.384	Rp14.419.625.709	Rp61.052.607.205	Rp87.069.345.649	Rp100.286.477.097	Rp100.143.451.532	Rp60.083.024.123	Rp57.515.713.145	Rp44.105.450.060	Rp32.120.911.912	Rp12.709.431.780	Rp2.323.405.030	Rp349.293.142
5.2.01	Belanja Modal Tanah	Rp1.678.575.850	Rp1.678.575.850	Rp0	Rp0	Rp1.500.000.000	Rp0	Rp50.000.000	Rp0	Rp0	Rp125.575.850	Rp0	Rp3.000.000	Rp0	Rp0
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp61.595.682.405	Rp61.595.682.405	Rp3.536.780.709	Rp20.981.569.705	Rp7.919.730.033	Rp3.680.618.314	Rp14.623.996.343	Rp1.232.925.762	Rp4.765.728.205	Rp773.202.410	Rp188.708.862	Rp1.219.723.890	Rp2.323.405.030	Rp349.293.142
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp105.822.043.106	Rp105.822.043.106	Rp216.900.000	Rp3.081.647.500	Rp20.305.419.850	Rp26.144.700.015	Rp18.780.374.665	Rp13.967.555.096	Rp12.213.657.690	Rp9.391.314.750	Rp262.500.000	Rp1.457.973.540	Rp0	Rp0
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Rp377.740.685.023	Rp377.740.685.023	Rp10.045.945.000	Rp18.594.390.000	Rp56.139.945.766	Rp69.212.783.768	Rp64.618.205.524	Rp44.378.143.265	Rp39.477.077.250	Rp33.625.757.050	Rp31.669.703.050	Rp9.978.734.350	Rp0	Rp0
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp25.142.750.000	Rp25.142.750.000	Rp620.000.000	Rp18.395.000.000	Rp1.204.250.000	Rp1.049.375.000	Rp2.070.875.000	Rp504.400.000	Rp1.059.250.000	Rp189.600.000	Rp0	Rp50.000.000	Rp0	Rp0
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	Rp199.000.000	Rp199.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp199.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	Rp20.000.000.000	Rp20.000.000.000	Rp20.000.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	Rp20.000.000.000	Rp20.000.000.000	Rp20.000.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.4	BELANJA TRANSFER	Rp400.344.018.414	Rp400.344.018.414	Rp164.000.000.000	Rp236.344.018.414	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	Rp15.323.435.514	Rp15.323.435.514	Rp0	Rp15.323.435.514	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	Rp385.020.582.900	Rp385.020.582.900	Rp164.000.000.000	Rp221.020.582.900	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	Rp11.000.000.000	Rp11.000.000.000	Rp0	Rp11.000.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
6.2.02	Penyerahan Modal Daerah	Rp11.000.000.000	Rp11.000.000.000	Rp0	Rp11.000.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA DAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN PER BULAN		Rp2.678.368.691.944	Rp2.678.368.691.944	Rp357.461.514.298,25	Rp480.375.986.298,25	Rp358.670.516.674,25	Rp288.342.253.511,25	Rp258.799.716.968,25	Rp198.392.945.927,25	Rp212.743.324.686,25	Rp148.615.089.190,25	Rp155.099.763.788,25	Rp103.716.699.008,25	Rp86.627.044.158,25	Rp29.523.837.435,25
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA DAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN PER TRIWULAN		Rp2.678.368.691.944	Rp2.678.368.691.944	Rp1.196.508.017.270,75			Rp745.534.916.406,75			Rp516.458.177.664,75			Rp219.867.580.601,75		

